



Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Blue Carbon Ecosystem Di Desa Muntai Barat Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Arif Rahman Hakim¹⁾, Rio Tut Rianto²⁾

Universitas Islam Riau, Jalan Kaharuddin Nasution No.113, Pekanbaru, Indonesia

arifrahmanhakim@soc.uir.ac.id¹⁾
riotutrianto@soc.uir.ac.id²⁾

Abstrak

Collaborative Governance yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Pemerintah Desa Muntai Barat dengan beberapa stakeholder dalam upaya pengelolaan mangrove akibat deforestasi terkait dengan dukungan berkelanjutan serta untuk menyelamatkan hutan mangrove Di Desa Muntai Barat Kecamatan Bantan. Mangrove Desa Muntai Barat masuk ke dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Mangrove dengan luas mencapai 1.292 ha. Rehabilitasi Mangrove berbasis *Blue Carbon Ecosystem* dipulihkan karena mangrove menyimpan karbon 4-5 kali lebih banyak dari hutan tropis sehingga berkontribusi besar pada penyerapan emisi karbon untuk meredam efek rumah kaca. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gesh (2007) yang terdiri dari lima tahap seperti *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *share understanding* dan *intermediate outcome*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer melalui observasi dan wawancara serta didukung data sekunder melalui studi pustaka. Pemilihan informan penelitian melalui *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi Pemerintah dilakukan dengan rehabilitasi mangrove secara massif dimulai dengan tingkat pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa sejalan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang bersinergi dalam pengelolaan mangrove berbasis *blue carbon ecosystem*. Pengelolaan tersebut menghasilkan aktor lokal atau kelompok masyarakat yang diharapkan dapat melanjutkan upaya-upaya konservasi akibat deforestasi hutan mangrove Di Desa Muntai Barat Kecamatan Bantan sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: *Collaborative Governance*, Mangrove, *Blue Carbon Ecosystem*

Abstract

Collaborative Governance carried out by the Bengkalis Regency Government through the West Muntai Village Government with several stakeholders in efforts to manage mangroves due to deforestation related to sustainable support and to save mangrove forests in Muntai Barat Village, Bantan District. The Muntai Barat Village Mangrove is included in the National Economic Recovery (PEN) Mangrove with an area of 1,292 ha. Mangrove rehabilitation based on the Blue Carbon Ecosystem is restored because mangroves store 4-5 times more carbon than tropical forests, thus contributing greatly to the absorption of carbon emissions to reduce the greenhouse effect. The theory used in this study is the Collaborative Governance Theory from Ansell and Gesh (2007) which consists of five stages such as *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *share understanding* and *intermediate outcome*. The research method used in this study is a qualitative method with descriptive analysis. The data source in this study is primary data through observation and interviews and supported by secondary data through literature studies. The selection of research informants through *purposive sampling*. The results of the study show that the



Government's collaboration was carried out with massive mangrove rehabilitation starting from the central government level to the village government in line with community groups that synergize in mangrove management based on the blue carbon ecosystem. This management produces local actors or community groups who are expected to be able to continue conservation efforts due to deforestation of mangrove forests in Muntai Barat Village, Bantan District as part of efforts to support sustainable development.

Key words: Collaborative Governance, Mangrove, Blue Carbon Ecosystem.

PENDAHULUAN

Salah satu ekosistem pesisir yang sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan berbagai biota yang menghuni tempat tersebut adalah ekosistem mangrove. Penyediaan nutrisi bagi habitat perairan pesisir dan sekitarnya merupakan salah satu peran ekologis ekosistem mangrove yang paling signifikan dalam industri perikanan. Ekosistem mangrove menyediakan berbagai tujuan ekologi, ekonomi, dan sosial yang rumit.

Sungai yang besar dan terlindungi sangat ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan bakau di pantai. Tumbuhan bakau sangat cocok untuk bertahan terhadap kondisi lingkungan yang keras, termasuk tanah yang tergenang, kadar garam yang berlebihan, dan tanah yang tidak stabil. Beberapa jenis bakau mengembangkan pertahanan terhadap garam di jaringannya sebagai akibat dari kondisi lingkungan ini. Di sisi lain, beberapa jenis bakau lainnya menciptakan sistem akar pernapasan untuk membantu oksigenasi sistem akar.

Karbon biru merupakan salah satu term (Batasan) yang digunakan dalam mendeskripsikan jasa lingkungan mangrove ini. Ekosistem lainnya yang juga dapat berkontribusi ke karbon biru, antara lain rawa pasang surut dan padang lamun. Diperkirakan antara 340.000 hingga 980.000 hektar ekosistem karbon biru pesisir hancur setiap tahunnya, menjadikannya salah satu ekosistem yang paling terancam punah di planet ini. Dalam abad berikutnya, 30–40% rawa pasang surut yang tidak dilindungi, padang lamun, dan hampir semua hutan bakau akan hilang jika laju ini terus berlanjut. Ekosistem ini akan berkontribusi secara signifikan terhadap emisi gas rumah kaca karbon dioksida jika hilang. Untuk mempertahankan berbagai keuntungan yang ditawarkan habitat pesisir, karbon biru menawarkan peluang baru untuk mempromosikan dan membantu pelestarian, pemulihan, dan perlindungan ekosistem ini di seluruh dunia. Lebih jauh lagi, penggunaan karbon biru merupakan cara untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs, poin 14: pelestarian dan keberlanjutan sumber daya laut dan kehidupan laut untuk pembangunan berkelanjutan, kehidupan di bawah air - kehidupan bawah laut).

Pengelolaan mangrove berbasis karbon biru berbeda dengan pengelolaan hutan biasa karena generasi sekarang tidak mewarisi pengetahuan lokal dari para leluhurnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mengelola dan memulihkan mangrove. Padahal, kunci pengelolaan mangrove berbasis masyarakat adalah apakah masyarakat mendapat insentif dari pengelolaan mangrove atau tidak. Jika masyarakat yakin bahwa mangrove penting, mereka akan menjaganya. Di sisi lain, tanpa kelembagaan yang kuat di tingkat lokal dan regional, pengelolaan tidak akan berhasil.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan hal yang sangat penting dalam upaya pelestarian mangrove di Desa Muntai Barat. Pengelolaan mangrove tidak akan berjalan efektif tanpa adanya komitmen dari Pusat dan Daerah, serta model insentif yang diberikan kepada masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pertimbangan ekonomi menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan mangrove tetap terjaga kelestariannya. Kondisi sosial ekonomi Desa Muntai Barat dilihat dari mata pencaharian penduduk setempat yang seringkali bermata pencaharian sebagai nelayan dengan upah yang relatif pas-pasan. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya pemahaman tentang pengembangan usaha yang menyebabkan hasil tangkapan nelayan dijual kepada pengepul secara borongan tanpa melalui proses pasca panen.

Desa Muntai Barat yang dikelilingi oleh laut dan pesisir pantai akan menawarkan berbagai macam kehidupan atau keuntungan, termasuk keuntungan sosial budaya, peluang rekreasi, dan kegiatan ekonomi. Di satu sisi, kesejahteraan penduduk Desa Muntai Barat dan ekonomi lokal

dapat didukung oleh wilayah laut dan pesisir pantai. Salah satu cara untuk mempromosikan pendidikan dan pengembangan karakter di Desa Muntai Barat adalah melalui pertumbuhan pariwisata, yang didasarkan pada pengelolaan lingkungan. Pertumbuhan ekowisata sebagai kegiatan wisata alam berbasis lingkungan saat ini menjadi salah satu kegiatan terkait pariwisata yang mulai diperhatikan oleh pemerintah.

METODE

Dari rumusan penelitian terlihat bahwa masing-masing variabel dideskripsikan dengan menggunakan informasi yang akan dikumpulkan melalui survei. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah "survei deskriptif". Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, dengan teori sebagai kerangka acuan penelitian. Di Desa Muntai Barat, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, peneliti melakukan wawancara mendalam secara langsung dengan informan kunci yang dianggap paling sesuai untuk Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Ekosistem Karbon Biru. Pemerintah Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu informan penelitian. 2) Kepala Desa Muntai Barat 3) Pengawas Mangrove.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang berjudul "*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis *Blue Carbon Ecosystem* Di Desa Muntai Barat Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis" mengkaji bagaimana bentuk kolaborasi pemerintah dengan Lembaga Masyarakat dalam mengelola mangrove berbasis karbon biru. Bentuk kolaborasi pemerintah dan lembaga masyarakat diharapkan pondasi awal destinasi Ekowisata yang berfokus pada perlindungan lingkungan mangrove dan memberikan dampak ekonomi bagi Masyarakat setempat.

Kabupaten Bengkalis sebagian besar berada pada kawasan pesisir pantai dan pinggir sungai. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Bengkalis menjadi lahan subur bagi perkebangan dan pertumbuhan ekosistem hutan mangrove salah satunya Desa Muntai Barat yang terletak di Kecamatan Bantan. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis tahun 2023 - 2024, luas lahan hutan mangrove mencapai 41.718 hektar yang tumbuh tersebar di pesisir pantai maupun pinggir sungai.

Tata kelola kolaboratif memiliki empat dimensi, menurut Anshel dan Gash (2007). Yang pertama adalah dimensi tata kelola kolaboratif dari kondisi awal; yang kedua adalah dimensi tata kelola kolaboratif kelembagaan; yang ketiga adalah dimensi tata kelola kolaboratif kepemimpinan; dan yang keempat adalah proses kolaboratif dengan tiga subdimensi: isu regulasi, arahan regulasi, dan implementasi. Proyek ini akan mengkaji bagaimana organisasi masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk mengelola hutan bakau di Desa Muntai Barat menggunakan metode Karbon Biru.

a. *Face to Face Dialogue* (Dialog Tatap Muka)

Proses interaksi tatap muka antar pemangku kepentingan merupakan bagian pertama dari proses tata kelola kolaboratif. Menurut Ansell dan Gash (2007), proses ini bertujuan untuk mencapai konsensus atau kesepakatan bersama. Dialog pribadi merupakan media komunikasi yang efektif untuk mengkomunikasikan informasi dan memberikan umpan balik kepada pemangku kepentingan. Dialog tatap muka merupakan proses penting yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembahasan dan mediasi isu-isu terkait proses tata kelola kolaboratif.

Interaksi personal dalam pengembangan Mangrove berbasis Karbon Biru Di Desa Muntai Barat dapat ditunjukkan melalui proses sosialisasi, pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh para stakeholder sesuai tugas pokok dan perannya. Hal ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan Pemerintah Desa Muntai Barat mengenai isu-isu dan peluang dalam pengelolaan mangrove, yaitu bagaimana menghadapi kondisi alam yang tidak dapat diprediksi dan abrasi yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekosistem Mangrove.

Pengembangan pengelolaan mangrove berbasis karbon biru Di Desa Muntai Barat dapat

dikatakan kurang optimal dengan kurangnya koordinasi dan sosialisasi serta pembinaan antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis terkait strategi pengelolaan mangrove berbasis karbon biru. Keterbatasan anggaran dan pengetahuan Pemerintah Desa menjadi faktor lainnya yang harus ditemukan solusinya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis mengingat besarnya potensi pengelolaan mangrove Di Desa Muntai Barat dengan mengedepankan pengelolaan berbasis karbon biru.

b. *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)

Membangun kepercayaan adalah merupakan proses penting ketika menerapkan kolaborasi. Proses tata kelola kolaboratif gagal mencapai tujuan yang ingin dicapai jika pemangku kepentingan yang terlibat tidak mampu membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan antar aktor (*trust building*) dilakukan untuk meningkatkan kontrol terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam mencapai tujuan kolaborasi pemerintah. Dalam perjalanannya kurangnya komitmen bersama dan keterbatasan sumber daya anggaran daerah menjadi penghambat proses tersebut, sehingga mengakibatkan koordinasi dan komunikasi dalam proses pengelolaan mangrove berbasis karbon biru terhambat Di Desa Muntai Barat Kecamatan Bantan.

c. *Commitment to Process* (Komitmen terhadap Proses)

Proses Tata Kelola Kolaboratif merupakan Komitmen terhadap proses yang ada merupakan elemen kunci dalam tata kelola kolaboratif yang sukses. Deserve (2007) menyatakan bahwa ukuran keberhasilan adalah komitmen terhadap tujuan bersama, dan setiap aktor mempunyai alasan dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama dalam prosesnya. Di sisi lain, komitmen terhadap proses kolaboratif sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dari kolaborasi adalah untuk mengatasi masalah yang tidak dapat diselesaikan secara individu. Oleh karena itu, dalam hal ini keterlibatan pemangku Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Pusat sebagai pendukung utama menjadi penting untuk melaksanakan visi dan misi serta mencapai tujuan bersama yaitu pengembangan pengelolaan Mangrove berbasis karbon biru Di Desa Muntai Barat. Harapan berjalannya proses *collaborative governance* adalah *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan pengelolaan Mangrove berbasis karbon biru Di Desa Muntai Barat memiliki tujuan yang sama dan komitmen dalam pelaksanaannya.

d. *Share Understanding* (Pemahaman Bersama)

Pemahaman bersama adalah proses menyelaraskan persepsi dan pemahaman untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama. Ansell dan Gash (2008) menunjukkan bahwa pemahaman bersama adalah pengembangan dari pemahaman bersama mengenai visi, misi ujuan, dan ideologi bersama. Implementasi kesepahaman bersama dalam pengembangan pengelolaan Mangrove berbasis karbon biru sedang berlangsung namun terdapat tantangan yaitu pemahaman yang kurang, koordinasi belum maksimal serta ego sektoral pelaksanaan. Hal ini berimplikasi pada belum optimalnya pemahaman bersama dalam pengembangan pengelolaan Mangrove Di Desa Muntai Barat.

e. *Intermediate Outcomes* (Hasil Sementara)

Hasil yang dicapai setelah proses kolaboratif dilaksanakan dan hasil akhir tercapai. Hasil dari proses kolaborasi bersifat sementara dan bukan merupakan tujuan utama kolaborasi yang dilakukan berhasil, kita bisa membicarakan hasil sementara yang konkret. Sedangkan tujuan utama pengembangan pengelolaan Mangrove berbasis karbon biru Di Desa Muntai Barat adalah dengan mewujudkan pengelolaan Mangrove yang lestari, terlindungi, dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sejalan dengan tujuan konservasi.

Keberhasilan kolaborasi juga membutuhkan beberapa faktor pendukung seperti : Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa juga masyarakat harus memiliki komitmen yang kuat, komunikasi yang jelas, terarah, dan tepat waktu menghindari kesalahpahaman dan konflik. Kemudian adanya riwayat kerja sama yang positif di antara pihak-pihak yang berkolaborasi, dan tersedia



sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki keahlian yang relevan. Ada juga beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan seperti semua anggota tim terbuka terhadap ide-ide baru dan inovasi, serta peran masing-masing pihak harus jelas, misalnya pemerintah menyediakan infrastruktur sedangkan masyarakat mengelola destinasi wisata.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian mengenai “*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis *Blue Carbon Ecosystem* Di Desa Muntai Barat Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis” menunjukkan adanya upaya yang signifikan untuk mencapai pengelolaan mangrove berbasis karbon biru yang berkelanjutan. Model kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat belum berhasil menciptakan dampak positif, baik dalam hal pelestarian lingkungan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis disarankan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana kebijakan guna menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Selain itu, pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran yang cukup bagi para pelaksana kebijakan, karena tanpa sumber daya tersebut, kegiatan apa pun tidak akan dapat terlaksana secara efektif, khususnya dalam pengelolaan mangrove berbasis karbon biru di Desa Muntai Barat, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice. Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Creswell. J.W. (2014). *Research Design, Qualitatives, Quantitstive, and Mixed Methods Approcahes (Fourth Edition)*. Singapore : SAGE Publications
- Kurnia, L. K. (2015). Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Kemitraan Pengelolaan Kawasan Ekowisata Mangrove WonoRejo Surabaya antara Pemerintah, Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil (*Doctoral dissertation*, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Lexy J, Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya
- Nurhafizha Khairi & Liyushiana. (2024). Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Masyarakat dalam Mengelola Desa Wisata Tanjung Rejo Kabupaten Deli Serdang *Jurnal Ilmiah Global Education*
- Wan Hermanto, Sujianto & Hasim As'ari. (2023). Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*